



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

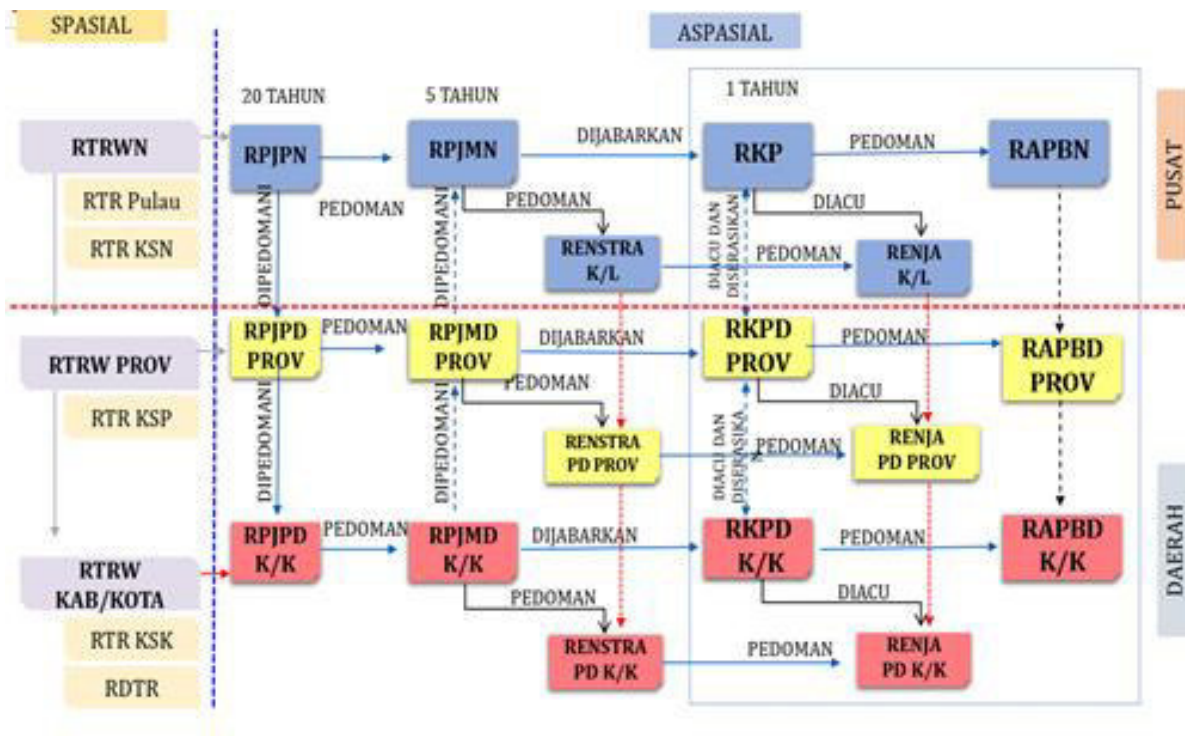
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bantul 2025-2045 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2024 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2025 - 2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul mengacu kepada RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045, visi, misi dan prioritas Bupati terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.

Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Kegiatan perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilaksanakan Forum OPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, kesepakatan yang dihasilkan Forum OPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini:



1.2 Dasar Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun

dengan maksud agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANTUL**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

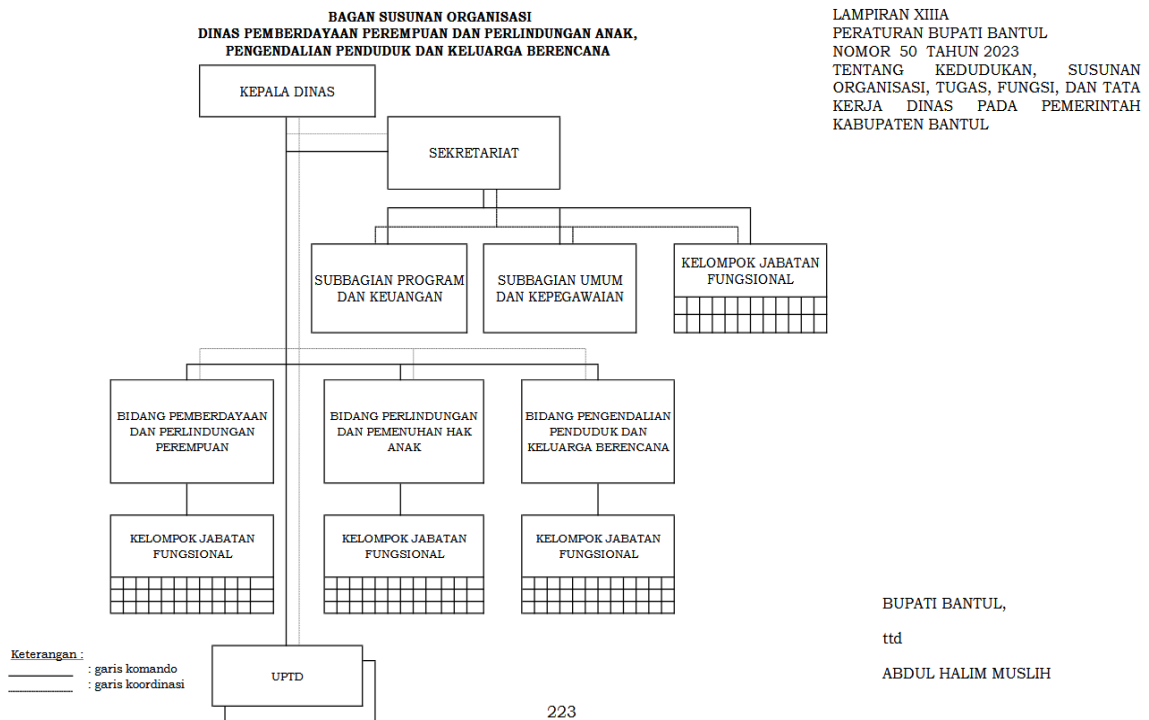
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- 4) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7) UPTD.



Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 32 orang dengan rincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	8 orang
2	Wanita	26 orang
Jumlah		34 orang

Sumber : DP3APPKB

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	5 orang
2	Sarjana (S-1)	15 orang
3	D4	3 orang
4	Diploma (D-3)	8 orang
5	Diploma (D-2)	-
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3 orang
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
8	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		34 orang

Sumber : DP3APPKB

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma 3	D4	S1	S2
1	II/a									
2	II/b									
3	II/c		1			1				
4	II/d	1	2				3			
5	III/a	1	9					1	9	
6	III/b	2	3			1	2	1	1	
7	III/c	0	2				1		1	
8	III/d	2	5				2	1	4	
9	IV/a	0	2							2
10	IV/b	1	1							2
11	IV/c	0	1							1
12	V	1				1				

Sumber : DP3APPKB

Jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	8 orang
2	Fungsional	11 orang
3	Non Struktural	15 orang
	Jumlah	34 orang

Sumber : DP3APPKB

c. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Bupati, yaitu: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Kategori Kabupaten Layak Anak serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB yaitu: prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak dan nilai KLA (Kabupaten Layak Anak). Berikut hasil capaian indikator tersebut dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun
2020-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	IKU PEMDA											
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	n/a	64,78	n/a	65,27	69,36	65,03	71,01	70,35	72,66	75,97
2	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	n/a	Madya	n/a	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama*
	IKU Dinas											
1	Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Prevalensi	n/a	0,47	n/a	0,47	0,45	0,32	0,43	0,365	0,41	0,362
2	Nilai KLA	Angka	n/a	632,9	n/a	n/a	730	715	830	888,81	890	888,81*

Berdasarkan data table diatas dapat disimpulkan bahwa:

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), terjadi kenaikan nilai yang stabil dari 64,78 di tahun 2020 menjadi 75,97 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan gender yang dilakukan secara konsisten telah membuahkan hasil nyata. Bahkan, pada tahun 2024, realisasi indeks berhasil melampaui target sebesar 3,31 poin, mengindikasikan pelaksanaan program-program terkait gender berjalan lebih efektif dari yang direncanakan.

2) Kategori Kabupaten Layak Anak

Pada Indikator Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA), progres signifikan juga tercatat. Status kategori meningkat dari "Madya" di tahun 2020 menjadi "Nindya" pada tahun 2022, dan mencapai "Utama" pada 2023 serta dipertahankan pada 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak, sehingga target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu utama terealisasi 100% dengan Kabupaten Bantul mendapatkan kategori Utama dalam penghargaan Kabupaten Layak Anak. Peningkatan ini memperlihatkan adanya perbaikan sistematis dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah, sekaligus konsistensi dalam menjaga kualitas layanan terhadap anak.

3) Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Indikator Prevalensi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024. Karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil nilainya semakin baik), capaian yang lebih rendah dari target menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan, capaian ini menandakan efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

4) Nilai KLA

Nilai KLA menunjukkan tren kenaikan konsisten dari 632,9 (2020) menjadi 888,81 (2024). Tahun 2024 tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak, sehingga target yang ditetapkan tahun 2024 terealisasi 888,81. Ini mencerminkan komitmen Kabupaten Bantul dalam memperbaiki kualitas pelayanan terhadap anak.

2) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menopang satu Indikator Kinerja Utama Dinas P3APKB yaitu: rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Berikut capaian indikator dan perbandingan dengan tahun sebelumnya:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	n/a	2,56	n/a	2,54	2,5	2,05	2,45	1,064	2,4	0,80

Berdasarkan data realisasi rata-rata jumlah anak per keluarga dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya penurunan yang sangat tajam:

- 1) Awal periode (2020–2021) Rata-rata jumlah anak per keluarga masih di atas angka ideal 2 anak (masing-masing 2,56 dan 2,54). Ini menandakan bahwa pada awal periode, kecenderungan memiliki keluarga dengan 2 anak atau lebih masih kuat.
- 2) Mulai tahun 2022 terjadi penurunan signifikan ke 2,05 sedikit di atas angka ideal, tapi sudah menunjukkan sinyal penurunan ke arah kurang stabil.
- 3) Tahun 2023 dan 2024 penurunan drastis terjadi, dengan rata-rata hanya 1,064 anak di 2023 dan 0,80 anak di 2024. Ini berarti jumlah anak rata-rata per keluarga menjadi kurang dari 1 anak, yang menandakan bahwa sebagian besar keluarga mungkin memilih tidak punya anak atau hanya memiliki 1 anak saja. Konsekuensi dari tren ini antarlain:
 - a) Rata-rata berada di bawah 2 anak, populasi tidak akan tergantikan secara alami (*replacement level fertility* tidak tercapai);
 - b) rata-rata dibawah 1 anak seperti tahun 2024, dalam jangka panjang akan memicu *depopulasi* (penurunan jumlah penduduk) yang bisa mengakibatkan:
 - Meningkatnya populasi lansia tanpa cukup tenaga kerja muda.
 - Beban ekonomi bertambah, karena sedikit generasi produktif yang menopang generasi tua.
 - Permintaan terhadap layanan kesehatan dan sosial meningkat, sedangkan produktivitas daerah bisa menurun.

d. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2022-2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	259.737.500	263.887.500	503.875.151	257.277.500	263.887.500	503.691.600	99	100	99,95
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.625.000	20.025.000	68.625.000	10.625.000	20.025.000	68.625.000	100	100	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.625.000	20.025.000	68.625.000	10.625.000	20.025.000	68.625.000	100	100	100
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.575.000	129.075.000	347.750.151	16.575.000	129.075.000	347.569.500	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	16.575.000	129.075.000	347.750.151	16.575.000	129.075.000	347.569.500	100	100	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	232.537.500	114.787.500	87.500.000	230.077.500	114.787.500	87.499.600	99	100	99,95
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000	49.000.000	33.750.000	49.000.000	49.000.000	33.749.800	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.912.500	63.162.500	47.912.500	178.452.500	63.162.500	47.912.400	99	100	100
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.625.000	2.625.000	5.837.500	2.625.000	2.625.000	5.837.400	100	100	100
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	670.656.800	950.860.570	808.410.006	641.660.408	905.400.400	792.776.236	96	95,2	98,07
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.450.000	149.500.000	189.053.612	146.950.000	144.000.000	189.053.612	98	96,3	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	150.450.000	149.500.000	189.053.612	146.950.000	144.000.000	189.053.612	98	96,3	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	497.681.800	626.635.570	526.006.494	472.185.408	587.925.400	514.072.924	95	93,8	97,73
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	208.192.320	390.608.070	292.518.556	207.249.930	385.265.000	292.518.356	99	98,6	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	289.489.480	236.027.500	233.487.938	264.935.478	202.660.400	221.554.568	92	85,9	94,89
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.525.000	174.725.000	93.349.900	22.525.000	173.475.000	89.649.900	100	99,3	96,04
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.525.000	174.725.000	93.349.900	22.525.000	173.475.000	89.649.900	100	99,3	96,04
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	7.850.000	68.786.620	47.600.000	7.850.000	64.961.500	47.475.000	100	94,4	99,74

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.850.000	68.786.620	47.600.000	7.850.000	64.961.500	47.475.000	100	94,4	99,74
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.850.000	68.786.620	47.600.000	7.850.000	64.961.500	47.475.000	100	94,4	99,74
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	483.833.745	548.411.745	285.287.556	477.497.325	540.336.620	285.277.356	99	98,5	100
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	127.050.000	139.394.140	39.885.500	124.550.000	136.069.140	39.885.500	98	97,6	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	127.050.000	139.394.140	39.885.500	124.550.000	136.069.140	39.885.500	98	97,6	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	356.783.745	409.017.605	245.402.056	352.947.325	404.267.480	245.391.856	99	98,8	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas	120.734.245	240.390.960	140.633.500	120.234.245	237.990.960	140.623.500	100	99	99,99

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.688.484	140.006.925	64.262.500	203.330.000	137.656.800	64.262.300	99	98,3	100
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.361.016	28.619.720	40.506.056	29.383.080	28.619.720	40.506.056	97	100	100
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	869.967.975	970.097.200	1.075.036.830	819.561.081	829.746.570	1.065.634.222	94	85,5	99,13
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	767.661.975	868.437.200	447.489.468	717.255.081	728.086.570	438.345.110	93	83,8	97,96
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	231.310.000	144.485.000	171.877.668	230.925.990	99.925.800	171.177.378	99	69,2	99,59
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	NA	NA	275.611.800	NA	NA	267.167.732	NA	NA	96,94
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	229.159.500	308.868.225	NA	180.005.000	233.930.900	NA	74	75,7	NA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	115.152.475	166.118.975	NA	115.152.475	164.868.850	NA	100	99,3	NA
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	192.040.000	248.965.000	NA	191.171.616	229.361.020	NA	99	92,1	NA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000	101.660.000	627.547.362	102.306.000	101.660.000	627.289.112	100	100	99,96
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	NA	NA	382.264.912	NA	NA	382.264.912	NA	NA	100
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	NA	NA	108.095.500	NA	NA	107.837.400	NA	NA	99,76
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	NA	NA	137.186.950	NA	NA	137.186.800	NA	NA	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000	101.660.000	NA	102.306.000	101.660.000	NA	100	100	NA
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.013.055.545	6.955.798.039	6.493.308.954	5.132.816.884	6.646.279.236	5.848.473.922	85	95,6	90,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.100.548	104.394.000	151.459.224	86.071.044	104.376.500	151.239.124	99	100	99,85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.150.548	94.394.000	137.459.224	75.121.044	94.376.500	137.239.124	99	100	99,84
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.950.000	10.000.000	14.000.000	10.950.000	10.000.000	14.000.000	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.943.788.478	4.820.205.478	5.438.160.751	4.117.322.774	4.611.084.826	4.836.749.524	83	95,7	88,94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.943.788.478	4.679.788.478	5.310.275.751	4.117.322.774	4.477.402.826	4.708.864.524	83	95,7	88,67
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	129.060.000	117.885.000	NA	122.360.000	117.885.000	NA	94,8	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	NA	11.357.000	10.000.000	NA	11.322.000	10.000.000	NA	99,7	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.677.444	1.135.073.427	294.828.055	283.764.660	1.072.711.902	280.431.442	93	94,5	95,12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	8.494.200	6.196.600	NA	8.494.200	6.196.600	NA	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.782.694	438.675.920	76.539.455	49.535.000	433.668.920	75.339.455	96	98,9	98,43
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.745.000	15.000.000	15.510.000	13.745.000	15.000.000	15.510.000	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.545.750	6.500.088	4.890.000	16.545.750	6.500.000	4.890.000	100	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.080.000	2.400.000	100	86,7	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	50.000.000	38.850.000	NA	48.150.000	38.845.000	NA	96,3	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.204.000	588.228.219	146.364.500	201.540.410	533.043.782	133.172.887	92	90,6	90,99
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	NA	8.500.000	1.802.500	NA	8.500.000	1.802.500	NA	100	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	17.275.000	2.275.000	NA	17.275.000	2.275.000	NA	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	9.102.000	NA	NA	9.102.000	NA	NA	100	NA
	Pengadaan Mebel	NA	9.102.000	NA	NA	9.102.000	NA	NA	100	NA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.941.048	191.538.000	238.247.840	276.777.338	175.665.608	213.281.082	97	91,7	89,52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	150.000	NA	4.800.000	98.000	NA	100	65,3	NA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.770.000	9.000.000	9.000.000	15.327.194	4.366.488	4.199.227	86	48,5	46,66
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.409.250	15.750.000	20.100.000	55.409.250	15.100.000	20.100.000	100	95,9	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.961.798	166.638.000	209.147.840	201.240.894	156.101.120	188.981.855	98	93,7	90,36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.548.027	695.485.134	370.613.084	368.881.068	673.338.400	366.772.750	94	96,8	98,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.475.000	82.647.200	39.570.800	183.341.908	80.044.000	38.879.847	91	96,9	98,25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	273.949.600	150.263.425	NA	260.769.900	148.398.680	NA	95,2	98,76
	Pemeliharaan Mebel	NA	9.100.000	7.050.000		9.100.000	7.050.000	NA	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.525.000	39.010.000	NA	29.525.000	38.640.000	NA	100	99,1	NA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.548.027	290.778.334	173.728.859	156.014.160	284.784.500	172.444.223	96	97,9	99,26
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	335.634.950	494.850.000	443.070.355	302.651.350	463.892.300	419.887.200	90	93,7	94,77
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.307.500	59.850.000	22.500.000	19.307.500	55.285.000	22.500.000	100	92,4	100
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	NA	43.050.000	22.500.000	NA	43.050.000	22.500.000	NA	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	19.307.500	16.800.000	NA	19.307.500	12.235.000	NA	100	72,8	NA
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	316.327.450	435.000.000	420.570.355	283.343.850	408.607.300	397.387.200	90	93,9	94,49
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	57.775.000	69.500.000	40.400.000	57.775.000	68.012.500	40.400.000	100	97,9	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	NA	64.200.000	40.000.000	NA	63.950.000	39.962.500	NA	99,6	99,91
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	NA	139.800.000	133.200.000	NA	139.800.000	133.200.000	NA	100	100
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.555.000	NA	NA	29.555.000	NA	NA	100	NA	NA
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	141.600.000	102.000.000	204.000.000	108.866.400	77.344.800	180.854.400	77	75,8	88,65
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBP	87.397.450	59.500.000	59.500.000	87.397.450	59.500.000	59.500.000	100	100	100
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.344.291.134	6.712.980.045	7.053.076.246	6.539.876.924	6.240.114.800	6.775.726.590	89	93	96,07
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.047.192.384	1.983.416.250	1.846.319.936	2.004.438.774	1.971.633.250	1.821.526.369	98	99,4	98,66

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	NA	NA	843.200.000	NA	NA	843.200.000	NA	NA	100
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	NA	NA	255.000.000	NA	NA	255.000.000	NA	NA	100
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	NA	NA	398.785.336	NA	NA	373.992.169	NA	NA	93,78
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	NA	NA	25.800.000	NA	NA	25.799.800	NA	NA	100
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	NA	NA	220.000.000	NA	NA	220.000.000	NA	NA	100
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	80.000.000	NA	3.875.000	80.000.000	NA	89	100	NA
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	54.400.000	NA	25.000.000	54.112.000	NA	100	99,5	NA
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	706.067.384	322.734.000	NA	688.179.352	322.734.000	NA	97	100	NA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	278.200.000	268.075.000	NA	278.200.000	268.075.000	NA	100	100	NA
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	688.500.000	818.550.000	NA	670.809.422	818.430.000	NA	97	100	NA
	Pengendalian Program KKBPK	345.050.000	439.657.250	103.534.600	338.375.000	428.282.250	103.534.400	98	97,4	100
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	897.038.000	1.111.924.380	610.029.500	888.755.500	1.105.438.000	610.029.500	99	99,4	99,76
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	NA	24.000.000	NA	NA	24.000.000	NA	NA	100	NA
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	268.772.500	475.617.380	NA	266.940.000	471.441.000	NA	99	99,1	NA
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	628.265.500	612.307.000	610.029.500	621.815.500	609.997.000	610.029.500	99	99,6	99,76
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.482.785.750	2.788.176.915	3.852.476.810	2.729.557.650	2.337.706.050	3.601.361.421	78	83,8	93,48

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49.100.000	286.836.000	281.707.836	48.790.000	259.072.500	263.191.623	99	90,3	93,43
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.658.286.250	1.730.822.915	3.378.078.750	1.012.417.250	1.345.972.050	3.150.175.000	61	77,8	93,25
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20.000.000	128.990.000	115.390.224	3.000.000	110.391.500	110.957.298	15	85,6	96,16
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.552.017.000	406.903.000	56.300.000	1.502.953.900	391.690.000	56.037.500	97	96,3	99,53
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.400.000	44.100.000	NA	26.400.000	44.030.000	NA	100	99,8	NA
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	72.632.500	81.775.000	NA	72.632.500	81.775.000	NA	100	100	NA
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	59.100.000	68.350.000	NA	55.350.000	64.375.000	NA	94	94,2	NA
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	45.250.000	40.400.000	21.000.000	8.014.000	40.400.000	21.000.000	18	100	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	917.275.000	829.462.500	744.250.000	917.275.000	825.337.500	744.249.500	100	99,5	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	32.900.000	42.812.500	NA	32.900.000	42.812.500	NA	100	100	NA
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	NA	9.000.000	3.750.000	NA	6.225.000	3.749.500	NA	69,2	99,99
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	NA	NA	740.500.000	NA	NA	740.500.000	NA	NA	100
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	884.375.000	757.650.000	NA	884.375.000	757.650.000	NA	100	100	NA
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	NA	20.000.000	NA	NA	18.650.000	NA	NA	93,3	NA
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.566.320.000	3.661.870.000	2.869.837.900	4.030.655.000	3.586.542.500	2.869.837.700	88	97,9	100
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.552.097.500	3.515.187.500	296.465.400	4.016.432.500	3.469.065.000	296.465.400	88	98,7	100
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	973.850.000	360.000.000	296.465.400	836.625.000	355.800.000	296.465.400	86	98,8	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	19.862.500	68.450.000	NA	17.862.500	61.200.000	NA	90	89,4	NA
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	341.405.000	226.050.000	NA	305.785.000	199.665.000	NA	90	88,3	NA
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.216.980.000	2.797.800.000	NA	2.856.160.000	2.791.800.000	NA	89	99,8	NA
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	NA	62.887.500	NA	NA	60.600.000	NA		96,4	NA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.222.500	146.682.500	2.573.372.500	14.222.500	117.477.500	2.573.372.300	100	80,1	100
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	NA	19.850.000	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	NA	6.507.500	15.572.500	NA	6.507.500	15.572.300	NA	100	100
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu	NA	NA	1.218.000.000	NA	NA	1.218.000.000	NA	NA	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Presentase Realisasi (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	NA	NA	1.339.800.000	NA	NA	1.339.800.000	NA	NA	100
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.222.500	47.000.000	NA	14.222.500	42.995.000	NA	100	91,5	NA
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	NA	73.325.000	NA	NA	67.975.000	NA	NA	92,7	NA
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	502.650.000	332.315.000	250.000.000	477.885.000	329.915.000	247.549.900	95	99,3	99,02
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	502.650.000	332.315.000	250.000.000	477.885.000	329.915.000	247.549.900	95	99,3	99,02
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	502.650.000	332.315.000	250.000.000	477.885.000	329.915.000	247.549.900	95	99,3	99,02

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya angka kelahiran	Angka TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) berada di bawah target pembangunan kependudukan	<ul style="list-style-type: none">• Faktor sosial-ekonomi meliputi: biaya pendidikan, ekonomi keluarga, dan pekerjaan yang mempengaruhi keinginan memiliki anak• Pengaruh gaya hidup modern yang membuat pasangan enggan memiliki banyak anak
2.	Keluarga berisiko stunting masih cukup tinggi	Intervensi terhadap keluarga berisiko stunting belum terintegrasi secara menyeluruh	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya pemahaman calon pengantin dan orang tua terhadap pentingnya seribu hari pertama masa kehidupan anak• Pola asuh pencegahan stunting dan pemenuhan gizi belum memadai karena pemberian ASI/MPASI tidak sesuai serta pengetahuan orang tua tentang gizi dan tumbuh kembang masih terbatas• Koordinasi pendamping keluarga belum berjalan optimal
3.	Belum optimalnya pengarusutamaan gender	Keterlibatan perempuan dalam ranah publik meliputi: politik, pemerintahan, ekonomi, serta sosial-budaya dan pengambilan keputusan masih terbatas.	<ul style="list-style-type: none">• Hambatan kultural dan sosial meliputi: patriarki dan stereotip gender• Hambatan struktural meliputi: kelemahan hukum, kurangnya kepemimpinan dan dukungan politik, serta tidak adanya sanksi yang jelas untuk pelanggaran hukum• Minimnya pelatihan pemberdayaan perempuan• Keterbatasan data pilah gender

NO	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
4.	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penanganan dan pencegahan kekerasan belum berjalan optimal karena layanan belum merata, koordinasi lintas sektor masih lemah, dan upaya pencegahan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan belum menyeluruh • Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor • Koordinasi lintas sektor belum maksimal • Masih adanya budaya patriarki
5.	Adanya perkawinan anak	Upaya pencegahan perkawinan anak belum merata dan belum terinternalisasi dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi • Minimnya pengawasan dan pendampingan keluarga

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu-isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Penyuluh KB di Kabupaten Bantul, dengan jumlah 53 orang • Adanya kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di masing-masing padukuhan • Adanya UPTD PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak Bantul (Fonaba), Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah • Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di masing-masing kapanewon. • Pemberdayaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di masing-masing kalurahan • Adanya buku pilah gender dan analisa anggaran responsif gender yang dibuat perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya angka kelahiran • Keluarga berisiko stunting masih cukup tinggi • Belum optimalnya pengarusutamaan gender • Kesadaran akan kesetaraan gender yang masih kurang • Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Adanya perkawinan anak 	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia • Percepatan penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan TFR agar sesuai dengan standar capaian ideal • Meningkatkan kinerja pendamping keluarga dan PLKB • Menurunkan angka prevalensi stunting • Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik pemerintahan, ekonomi, serta sosial-budaya • Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,05	96,05	96,11	96,19	96,28	96,36	96,45	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	berkualitas										
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,20*	70,20*	70,25 - 70,35	70,35 - 71,50	70,40 - 71,55	70,45 - 71,60	70,50 - 71,65	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,38*	64,38*	64,50	65,00	65,50	66,00	66,20	
			Total Fertility Rate	1,53	1,53	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	61,4	61,70	62,00	62,20	62,50	62,80	63,10	
		Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	31	28	26	25	24	23	22	
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	4,19	4,06	3,93	3,80	3,67	3,54	3,41	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul. Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Memperkuat fondasi kebijakan dan kelembagaan dalam meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix	Meningkatkan dukungan sarana prasarana penunjang pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix	Perluasan program dan akses layanan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix	Pemantapan dan keberlanjutan program pemenuhan dan perlindungan hak anak, penanggulangan stunting dan pengarusutamaan gender dengan keterlibatan pentahelix

Arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berikut merupakan Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan PUG melalui regulasi, kelembagaan, dan perencanaan responsif gender • Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dan desa dalam pelaksanaan PUG • Integrasi PUG dalam kebijakan dan program lintas sektor 	Memastikan PUG terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan daerah, dengan dukungan regulasi, SDM yang kompeten, serta sinergi lintas sektor
2	Menurunkan kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan layanan perlindungan yang mudah 	Peningkatan akses layanan yang cepat dan ramah korban,

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
		<p>diakses dan responsif terhadap korban kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak • Penguatan sistem pelaporan dan rujukan kasus kekerasan di tingkat desa dan kecamatan 	<p>mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan kasus</p>
3	<p>Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan edukasi pola asuh berbasis hak anak dan kesetaraan gender • Penyediaan layanan konseling dan perlindungan berbasis keluarga • Pelatihan keterampilan ekonomi produktif 	<p>Memastikan keluarga menjadi lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui edukasi, layanan pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga</p>
4	<p>Peningkatan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang kependudukan dan keluarga berencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas SDM dan pengembangan media KIE yang efektif dan sesuai sasaran • Pemanfaatan teknologi informasi dan kampanye publik untuk memperluas jangkauan pesan KIE kependudukan dan KB • Pendekatan khusus dan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau kelompok prioritas secara tepat sasaran 	<p>Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kependudukan dan KB melalui strategi komunikasi yang efektif, berbasis teknologi, dan melibatkan berbagai pihak untuk menjangkau sasaran prioritas</p>

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Berikut disajikan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif																			
	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM Laki-Laki dibagi IPM Perempuan dikali 100	Indeks	96,05	96,11	96,19		96,28		96,36		96,45		96,53		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IPA = Rata-rata tertimbang dari semua indikator perlindungan anak	Angka	70,20*	70,25 - 70,35	70,35 - 71,50		70,40 - 71,55		70,45 - 71,60		70,50 - 71,65		70,55 - 71,70		
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	iBangga = Rata-rata tertimbang dari tiga aspek utama kualitas keluarga	Angka	64,38*	64,50	65,00		65,50		66,00		66,20		66,40		
				Total Fertility Rate	TFR = Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	Orang	1,53	1,54	1,55		1,56		1,57		1,58		1,59		
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Rata-rata geometrik dari 20 indikator yang berasal dari Kemenkes dan BPS	Indeks	61,40	61,70	62,00		62,20		62,50		62,80		63,10		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) dibagi Jumlah total penduduk perempuan dikali 100.000	Angka	31,00	28,00	26,00		25,00		24,00		23,00		22,00		
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi Jumlah total penduduk anak dikali 10.000	Angka	4,19	4,06	3,93		3,80		3,67		3,54		3,41		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penilaian AKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Angka	81,35	81,5	81,75	6.411.390.735	82	6.450.430.586	82,25	6.485.434.325	82,5	6.475.906.529	82,75	6.520.046.356	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah	Indeks	91,22	91,61	92		92,50		93,00		93,50		94,00		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	100	100	118.387.500	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	7	7	7	101.387.500	7	110.000.000	7	110.000.000	7	110.000.000	7	110.000.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	5	5	5	17.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		Persen	100	100	100	5.733.585.751	100	5.733.585.751	100	5.733.585.751	100	5.733.585.751	100	5.733.585.751	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	30	30	32	5.590.275.751	32	5.590.275.751	32	5.590.275.751	32	5.590.275.751	32	5.590.275.751	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	1	1	1	130.560.000	1	130.560.000	1	130.560.000	1	130.560.000	1	130.560.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	22	22	22	12.750.000	22	12.750.000	22	12.750.000	22	12.750.000	22	12.750.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		Persen	100	100	100	191.164.534	100	340.044.835	100	375.048.574	100	365.520.778	100	409.660.605	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	6	4	3	3.510.400	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	20	13	11	29.980.614	40	170.944.835	45	197.948.574	43	181.420.778	50	215.560.605	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	15	13	4	6.087.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	2	2	2	586.520	2	600.000	2	600.000	2	600.000	2	600.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Dokumen	2	2	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	1	1	1	20.500.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	1	1	124.117.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1	1	1	2.883.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	1	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	100	100	212.935.300	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	1	1	1	5.805.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	1	19.435.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	1	1	187.695.300	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	100	100	155.317.650	100	170.800.000	100	170.800.000	100	170.800.000	100	170.800.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	2	2	2	43.367.500	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	136	97	102	56.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	57	3	10	5.950.150	10	5.800.000	10	5.800.000	10	5.800.000	10	5.800.000	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	19	19	19	50.000.000	19	60.000.000	19	60.000.000	19	60.000.000	19	60.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15-19 tahun dalam 1 tahun dibagi Jumlah total perempuan usia 15-19 tahun dikali 1000	Angka	7,20	7,19	7,18	383.918.800	7,17	386.256.535	7,16	388.352.584	7,15	387.782.053	7,14	390.425.178	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan		Bulan	12	12	12	191.959.400	12	193.000.000	12	194.176.292	12	193.800.000	12	195.200.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kegiatan	12	12	12	95.979.700	12	96.500.000	12	97.088.146	12	96.900.000	12	97.600.000	
			Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen	n/a	n/a	1	95.979.700	1	96.500.000	1	97.088.146	1	96.900.000	1	97.600.000	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan		Persen	100	100	100	191.959.400	100	193.256.535	100	194.176.292	100	193.982.053	100	195.225.178	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana		Laporan	12	12	12	95.979.700	12	96.500.000	12	97.088.146	12	96.900.000	12	97.600.000	
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga		Dokumen	3	3	3	95.979.700	3	96.756.535	3	97.088.146	3	97.082.053	3	97.625.178	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah perempuan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan KB dibagi	Persen	23,94	21,5	19,25	9.181.104.243	17,00	9.237.009.264	15,25	9.287.134.579	13,00	9.273.490.786	11,25	9.336.698.968	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
					Jumlah total perempuan usia subur yang menikah atau sedang dalam hubungan dikali 100%														
				Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah perempuan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern dibagi Jumlah total perempuan usia subur yang menikah atau sedang dalam hubungan dikali 100%	Persen	65,23	65,24	65,25		65,26		65,27		65,28		65,29		
				Kehamilan Tidak Direncanakan	Jumlah Ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian dibagi dengan jumlah ibu hamil dikali 100%	Persen	1,11	1,10	1,09		1,08		1,07		1,06		1,05		
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE		Persen	80	80	80	1.830.000.000	100	1.873.604.635	100	1.909.134.579	100	1.909.134.579	100	1.950.000.000	
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		Laporan	1	1	1	300.000.000	1	312.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	330.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Laporan	1	1	1	300.000.000	1	311.000.000	1	315.000.000	1	315.000.000	1	320.000.000	
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Laporan	1	1	1	300.000.000	1	310.000.000	1	315.163.579	1	315.163.579	1	325.000.000	
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Dokumen	1	1	1	300.000.000	1	304.604.635	1	308.500.000	1	308.500.000	1	320.000.000	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal		Dokumen	1	1	1	230.000.000	1	234.000.000	1	238.471.000	1	238.471.000	1	240.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				yang dilaksanakan															
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi	30	30	19	400.000.000	20	402.000.000	20	412.000.000	20	412.000.000	20	415.000.000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB		Persen	100	100	100	4.900.000.000	100	#####	100	4.905.000.000	100	4.891.356.207	100	4.905.000.000	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Orang	34	34	34	900.000.000	34	905.000.000	34	905.000.000	34	905.000.000	34	905.000.000	
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Laporan	n/a	1	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	3.986.356.207	12	4.000.000.000	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB		Persen	90	90	90	2.261.104.243	100	2.267.404.629	100	2.278.000.000	100	2.278.000.000	100	2.286.698.968	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Kabupaten/Kota																
			Pengendalian Pendistribusi-an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah LaporanPengen-dalianPendistrib-usian Alat danObat Kontrasepsi danSarana PenunjangPelay-anan KB ke FasilitasKesehat-an TermasukJaring-an dan Jejaringnya		Laporan	12	12	12	450.000.000	12	452.000.000	12	462.000.000	12	462.000.000	12	470.000.000	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Orang	3286	800	3200	1.536.104.243	3200	1.538.404.629	3200	1.539.000.000	3200	1.539.000.000	3200	1.539.698.968	
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		Laporan	1	1	1	250.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	1	252.000.000	
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria		Orang	21	25	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja		Persen	80	80	80	190.000.000	100	191.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kampung	47	58	47	190.000.000	75	191.000.000	75	195.000.000	75	195.000.000	75	195.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan tribina dibagi Jumlah keluarga sasaran dalam wilayah dikali 100%	Persen	85	85	85,5	2.840.842.595	90,00	2.858.140.881	90,50	2.873.650.794	95,00	2.869.429.094	100	2.888.987.144	
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama.	Indeks	88,51	88,8	89,10		89,40		89,70		90,00		90,30		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Jumlah desa atau kalurahan yang memiliki kampung keluarga yang berkualitas mandiri dibagi jumlah desa atau kalurahan dikali 100 persen	Persen	66,67	70,1	73,70		77,50		81,40		85,60		90,00		
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R		Persen	100	100	100	2.840.842.595	100	2.858.140.881	100	2.873.650.794	100	2.869.429.094	100	2.888.987.144	
				Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga							100		100		100		100		
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Laporan/Dokumen	n/a	1	12	2.840.842.595	12	2.858.140.881	12	2.873.650.794	12	2.869.429.094	12	2.888.987.144	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
			PROGRAM PENGARUSU TAMBAHAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	(Jumlah Belanja Responsif Gender/Tot al Belanja Langsung) x 100%	Persen	17,35	72	18,00	347.080.213	18,50	349.193.633	19,00	351.088.558	19,50	350.572.771	20,00	352.962.278	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah		Perangkat Daerah	45	45	45	120.000.000	45	120.000.000	45	122.000.000	45	123.492.558	45	125.882.065	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara PUG		Laporan	n/a	n/a	1	120.000.000	1	120.000.000	1	122.000.000	1	123.492.558	1	125.882.065	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat		Persen	75	80	83	100.000.000	85	102.113.420	87	102.008.345	90	100.000.000	93	100.000.000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		Lembaga	n/a	n/a	28	100.000.000	30	102.113.420	30	102.008.345	30	100.000.000	30	100.000.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan		Persen	69	72	85	127.080.213	87	127.080.213	90	127.080.213	92	127.080.213	95	127.080.213	
			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan		Lembaga	n/a	n/a	20	127.080.213	30	127.080.213	30	127.080.213	30	127.080.213	30	127.080.213	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			n perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	Jumlah korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait dibagi jumlah korban kekerasan perempuan yang dilaporkan dikali 100 persen	Persen	100	100	100	1.584.413.668	100	1.594.061.383	100	1.602.711.676	100	1.600.357.121	100	1.611.265.167	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		Lembaga	50	50	55	584.413.668	55	590.000.000	55	595.000.000	55	595.250.000	55	599.000.000	
			Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan	n/a	n/a	1	584.413.668	1	590.000.000	1	595.000.000	1	595.250.000	1	599.000.000	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan		Lembaga	9	10	11	1.000.000.000	12	1.004.061.383	13	1.007.711.676	14	1.005.107.121	15	1.012.265.167	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	123	140	142	250.000.000	145	252.000.000	147	253.000.000	150	251.000.000	153	256.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	123	140	142	750.000.000	145	752.061.383	147	754.711.676	150	754.107.121	153	756.265.167	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	IPHA = 26%Klaster Hak Sipil dan Kebebasan + 28%Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif + 23%Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan +23%Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks	65,83*	66,13	66,43	322.055.820	66,73	324.016.862	67,03	325.775.164	67,33	325.296.565	67,63	327.513.789	
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak		Persen	15	17	20	43.555.820	22	44.000.000	25	44.000.000	28	44.000.000	30	45.000.000	
			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan		Lembaga	50	50	70	43.555.820	72	44.000.000	75	44.000.000	78	44.000.000	80	45.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Kabupaten/Kota															
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak		Lembaga	50	55	60	278.500.000	65	280.016.862	70	281.775.164	75	281.296.565	80	282.513.789	
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek		Orang	n/a	n/a	50	30.000.000	50	31.000.000	50	31.000.000	50	31.000.000	50	31.234.086	
			penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen	n/a	n/a	1	170.000.000	1	170.000.000	1	171.758.302	1	171.279.703	1	171.279.703	
			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan		Lembaga	n/a	n/a	5	78.500.000	5	79.016.862	5	79.016.862	5	79.016.862	5	80.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	IPKA = 25%Klaster Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja+ 12,5% Klaster Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas /non disabilitas) yang pernah mengakses internet + 12,5% Klaster Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas /non disabilitas) + 25%Klaster Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan + 25%Klaster Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar	Indeks	80,06*	80,11	80,16	2.077.793.940	80,21	2.090.445.917	80,26	2.101.789.876	80,31	2.098.702.122	80,36	2.113.006.892	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak		Persen	100	100	100	1.000.000.000	100	#####	100	1.011.000.000	100	1.011.000.000	100	1.016.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	94	160	160	250.000.000	162	253.000.000	165	255.000.000	167	255.000.000	170	257.000.000	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	94	160	160	750.000.000	162	753.000.000	165	756.000.000	167	756.000.000	170	759.000.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak		Lembaga	1	1	1	1.077.793.940	1	1.084.445.917	1	1.090.789.876	1	1.087.702.122	1	1.097.006.892	
			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		Dokumen	1	1	1	350.000.000	1	353.000.000	1	355.000.000	1	355.000.000	1	359.000.000	
			penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	n/a	n/a	1	377.793.940	1	377.793.940	1	379.789.876	1	376.702.122	1	378.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
									Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek		Orang	n/a	n/a	100	350.000.000	100	353.651.977	100	356.000.000	100	356.000.000	100	360.006.892	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Cakupan perempuan = jumlah penduduk perempuan dewasa di Bantul yang mendapat Fasilitasi dibagi jumlah seluruh penduduk perempuan dewasa di Bantul	Persen	n/a	n/a	0,35	400.000.000	0,35	100.000.000	0,36	100.000.000	0,36	100.000.000	0,37	100.000.000	
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan		Desa	44	n/a	4	400.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
			Pengembangan Ekonomi Perempuan**	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya		Orang	n/a	n/a	400	400.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
JUMLAH										23.548.600.014		23.389.555.061		23.515.937.556		23.481.537.041		23.640.905.772	

Keterangan : **Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana;

kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Proram Unggulan Daerah	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah	Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian keluarga melalui peningkatan kualitas hidup, ekonomi, dan ketahanan keluarga	a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Fokus pada pembinaan keluarga pra sejahtera dan rentan, melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan peran keluarga dalam ketahanan sosial

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

No	Indikator	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,11	96,19	96,28	96,36	96,45	96,53	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,25	70,35	70,40	70,45	70,50	70,55	
			-	-	-	-	-	-	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	70,35	71,50	71,55	71,60	71,65	71,70	
			64,50	65,00	65,50	66,00	66,20	66,40	
4	Total Fertility Rate	Orang	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59	
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,70	62,00	62,20	62,50	62,80	63,10	
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	28	26	25	24	23	22	
7	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	4,06	3,93	3,80	3,67	3,54	3,41	

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

No	Indikator	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	80,11	80,16	80,21	80,26	80,31	80,36	
2	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	66,13	66,43	66,73	67,03	67,33	67,63	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Angka	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-	Angka	7,19	7,18	7,17	7,16	7,15	7,14	

No	Indikator	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)								
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	21,50	19,25	17,00	15,25	13,00	11,25	
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	65,24	65,25	65,26	65,27	65,28	65,29	
8	Kehamilan Tidak Direncanakan	Persen	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	88,80	89,10	89,40	89,70	90,00	90,30	
10	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	70,10	73,70	77,50	81,40	85,60	90,00	
11	Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persen	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	
12	Kepadatan Penduduk	Orang per km ²	1945	1974	2003	2033	2064	2095	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711